

# URGENSI SINERGI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI BANJAR

## *THE URGENCY OF SYNERGIZING POVERTY REDUCTION PROGRAMES IN BANJAR*

**Muhtar**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial  
Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang Jakarta Timur. Telp. 021 8017146, Fax. 021 8017126.  
Email: much.ngano17@gmail.com

Diterima: 9 Juli 2019; Direvisi: 6 Nopember 2019; Disetujui: 29 Nopember 2019

### **Abstrak**

Kajian ini bertujuan mendeskripsikan urgensi sinergi program penanggulangan kemiskinan. Kompleksitas permasalahan penduduk miskin, menuntut dilakukannya sinergitas program dari para pihak, pusat dan daerah. Kajian dilaksanakan di Desa Pemurus, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan April 2018. Jenis dan pendekatan kajian deskriptif-kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dengan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan dan Program Rastra. Untuk memperkaya informasi, dilakukan *focus group discussion* dengan unsur Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Hasil kajian menunjukkan, sungguhpun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjar rendah (2,96 persen), jauh di bawah angka kemiskinan nasional (9,82 persen), namun kenyataan menunjukkan bahwa warga Desa Pemurus belum dapat mengakses air bersih sebagai salah satu kebutuhan dasar. Guna memenuhi kebutuhan dasar tersebut —untuk keperluan minum dan masak nasi— khususnya, dilakukan dengan cara sederhana, di mana mereka mengendapkan air sungai yang ada di dekat rumahnya dalam sebuah wadah, dan baru memanfaatkannya ketika air tersebut telah terlihat jernih. Ketika musim hujan, warga Desa Pemurus menjadikan air hujan sebagai alternatif sumber air bersih. Dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, dan pangan, warga Desa Pemurus sudah dapat mengakses bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan, Program Rastra, Pogram Indonesia Sehat, dan Pogram Indonesia Pintar, meskipun masih banyak terjadi *exclusion* dan *inclusion error* dari sisi data. Untuk itu, sinergi program penanggulangan kemiskinan, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar air bersih dan sanitasi bagi keluarga miskin, krusial dan mendesak dilakukan, dengan dilakukannya peningkatan koordinasi ditingkat pusat, sekurangnya antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terlebih dulu, yang kemudian diikuti di tingkat daerah.

**Kata Kunci:** *sinergi; program; penanggulangan kemiskinan.*

### **Abstract**

*The purpose of this study is describing the urgency of synergy on poverty reduction programes. The complexities of the poor citizen problems, needed a synergy of programes by stakeholders in the center level and the regions. The study, held in Pemurus Village, Aluh-Aluh, Banjar; South Kalimantan Province on April 2018. The type and approach of the study, descriptive-qualitative, through data colecting interviews with beneficiaries of family hope program, prosperous rice programes, Indonesia of healt programes, and Indonesia of education programes. In order to collect data and information, has used focus group discussion with elements of the Regional Poverty Reduction Coordination Team. The results shows, that even though the number of poor people in Banjar Regency low (2.96 percent), far below the national poverty rate (9.82 percent), in fact, citizens access to clean water as a basic needs at Pemurus village is not available. To fulfilling their basic needs: for drinking and cooking, particularly, the villagers, in a simple way by purifying water from the river near their house in a container. And during the rainy season, they use rainwater as an alternative source of clean water. Meanwhile, basic needs: education, health, and food, villagers have been able to access social assistance through Hope Family Program and prosperous rice programs, although there are still many exclusion and inclusion errors in data. Hence, it suggested, the synergy of poverty alleviation programes, especially clean water and proper sanitation, urgently, with the*

*first increasing coordination at the central level between the Ministry of Social Affairs and the Ministry of Public Works and Public citizens, then followed at the regional level.*

**Keywords:** *synergy; programs; poverty reduction.*

## PENDAHULUAN

Bank Dunia, pada September 2018, mengeluarkan data terkait tingkat kemiskinan global, bahwa terjadi penurunan 10 persen di tahun 2015 dari tahun 2013. Kemiskinan global menurun hampir di banyak negara, kecuali pada negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara karena dilanda konflik. Bank Dunia memperingatkan bahwa laju pengurangan kemiskinan telah melambat (Republika, 2018).

*Trend* penurunan jumlah penduduk miskin dunia tersebut juga terjadi di Indonesia, seperti yang terjadi di tingkat global, terjadinya pelambatan. Berdasarkan data BPS (2018), bahwa pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin (dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) sebesar 9,82 persen (25,95 juta orang), berkurang sebesar 633,2 ribu orang jika dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 7,26 persen, turun menjadi 7,02 persen pada Maret 2018. Sementara itu, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2017 sebesar 13,47 persen, turun menjadi 13,20 persen pada Maret 2018.

Dalam konteks daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, juga terjadi penurunan jumlah penduduk miskin. Kabupaten Banjar (2016) yang berpenduduk 554.443 Jiwa (laki-laki: 281.714 jiwa, perempuan 272.729 jiwa), yang tersebar di 20 wilayah kecamatan (277 desa, 13 kelurahan), jumlah penduduk miskinnya sebesar 2,96 persen (BPS, 2017). Persentase penduduk miskin tersebut menurun

dibanding tahun 2016 yang sebesar 3,10 persen (Bappelitbang Banjar, 2017).

Air bersih dan sanitasi yang buruk merupakan salah satu potret kemiskinan penduduk. Begitu penting arti air bersih dan sanitasi yang layak bagi kehidupan manusia, sehingga muncul komitmen global. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals/SDG's*, yang merupakan kelanjutan dari MDG's yang berakhir tahun 2015, dengan segala capaian dan yang belum dicapainya, bahwa sesungguhnya air bersih dan sanitasi yang berkualitas, menjadi satu dari 17 tujuan yang akan dicapainya. Indonesia, sebagai salah satu negara penanda tangan komitmen global, terikat untuk mewujudkannya.

Sejalan dengan komitmen global tersebut, sesungguhnya dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2012, sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, telah dijelaskan bahwa kebutuhan dasar adalah kebutuhan manusia yang meliputi: air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, kesehatan, psikososial, penampungan dan tempat hunian. Dalam konteks kajian ini, kebutuhan dasar dimaksud adalah kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, pendidikan, dan kesehatan.

Indonesia, sebagai negara yang sangat luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas sampai Rote, sangat beragam kondisi geografisnya dataran tinggi, dataran rendah, pantai, rawa, daerah aliran sungai (DAS), dan pesisir. Kondisi demikian sangat berpengaruh terhadap tata sumber air yang digunakan dan sanitasi warga masyarakat

Indonesia. Bagi keluarga kategori mampu, relatif tidak ada kendala untuk memperoleh air bersih dan sanitasi yang baik melalui pelbagai cara yang dilakukannya. Akan tetapi, bagi keluarga kurang mampu (miskin), cukup menjadi masalah. Karena kemiskinannya tersebut, mereka ‘terpaksa’ memanfaatkan air yang ada/tersedia (air rawa, air sungai) untuk memenuhi keperluan sehari-harinya, baik untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus (MCK), tidak terkecuali untuk kebutuhan air minum dan menan nasi.

Kondisi demikian sangat banyak dijumpai di Indonesia, khususnya daerah rawa, pesisir, dan DAS. Menurut Bank Dunia (2007, XXXII), “Indonesia perlu memecahkan permasalahan yang dihadapi penduduk miskin dalam mengakses air bersih dan sanitasi. Sekitar 50 juta penduduk miskin di perdesaan tidak terlayani air ledeng ...”. Terkait sanitasi, “80 persen dari penduduk miskin perdesaan dan 59 persen dari penduduk miskin perkotaan, tidak mempunyai akses terhadap akses sanitasi yang memadai”. Salah satunya adalah di Desa Pemurus sebagai salah satu desa yang berada di aliran sungai. Berdasarkan keterangan sebuah sumber, diperoleh informasi, sejak kemerdekaan hingga saat ini, mereka belum menikmati layanan air bersih (Kesling kawasan pantai pesisir, 2009).

Untuk itu, kajian ini bertujuan mendeskripsikan urgensi sinergi program penanggulangan kemiskinan, dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga miskin di Desa Pemurus, khususnya air bersih dan sanitasi yang layak.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan keluarga miskin, Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Sosial R.I. telah menyelenggarakan Program Keluarga Harapan (PKH), yang kemudian diperkuat Program Indonesia Pintar (PIP),

Program Indonesia Sehat (PIS). Disamping itu, untuk memenuhi kebutuhan dasar pangannya, Pemerintah Pusat, juga melalui Kementerian Sosial, telah diselenggarakan program bantuan sosial Beras Sejahtera (Rastra), yang kemudian bertransformasi menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), di mana sebelumnya dilakukan oleh Perum Bulog. Sementara itu, sumber air bersih dan sanitasi yang tidak layak, masih sangat banyak dijumpai di Indonesia, dan merupakan tugas dan fungsi institusi teknis lain. Untuk itu, sinergi program penanggulangan kemiskinan urgen dilakukan.

Najiyati dalam Rahmawati et al. (2014), mengartikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Sementara, menurut Covey (2004: 259), sinergi adalah saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil lebih besar daripada jumlah bagian per bagian. Menurut Vasconcellos, M. dan Vasconcellos, A. (2009), kemitraan dan sinergi mengandung rasa kerjasama, saling percaya dan sinergi antara individu dan organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Atas dasar ini, kemitraan berkaitan dengan hubungan antara dua atau lebih pemangku kepentingan untuk menggabungkan sumber daya yang berbeda dalam melakukan pendekatan bersama untuk mencapai tujuan bersama (McQuaid, 2000; Lewis, 2000; Penrose, 2000).

Dalam bersinergi, penting dilakukan koordinasi satu sama lain, sehingga terwujud suatu kegiatan yang efisien. Koordinasi merupakan penyalarsan secara teratur atau penyusunan kembali kegiatan-kegiatan yang saling bergantung dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama (Moekijat, 2002: 2).

Berdasarkan batasan seperti dikemukakan, sinergi adalah suatu kondisi, di mana terjadi

penyatuan dan/atau tindakan bersama (kompak), sehingga terjadi kegiatan gabungan (kolaborasi/interaksi) antara satu unsur/ elemen dengan unsur/ elemen lainnya, untuk menghasilkan efek kegiatan yang lebih besar daripada kegiatan individual.

## METODE

Kajian ini dilakukan pada pertengahan bulan April 2018 di Desa Pemurus. Jenis dan pendekatan kajian adalah deskriptif-kualitatif. Metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan & Taylor, 1975).

Data primer dikumpulkan dengan teknik wawancara terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yakni penerima PKH, Rastra/ BPNT, PIP; dan PIS. Disamping itu, juga dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para pihak penanggulangan kemiskinan daerah setempat. Sementara, data sekunder diperoleh dengan cara studi dokumentasi dengan memanfaatkan data sekunder yang dinilai relevan, termasuk *browsing* internet. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip *interview* serta material lain yang telah terkumpul, dengan maksud agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dari lapangan (Sudarwan, 2002: 209). Dengan kata lain, analisis data kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis, yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara meng-organisasikan data ke dalam kategori, menja-barkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, dan membuat

kesimpulan, sehingga mudah dipahami.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Gambaran umum Lokasi

Desa Pemurus adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Secara topografis, Desa Pemurus termasuk kategori daerah aliran sungai (DAS). Tipologinya, sawah pasang surut dan bibit tanam air Payau. Luas Desa Pemurus kurang lebih 6,45 kilometer persegi, dengan jumlah penduduk 809 Kepala Keluarga (2.783 jiwa), laki-laki 1587 jiwa dan perempuan 1358 jiwa. Dari 809 kepala keluarga tersebut, dapat dikelompokkan ke dalam lima kelompok, yaitu: Keluarga Prasejahtera: 368 KK, Keluarga Sejahtera I: 376 KK, Keluarga Sejahtera II: 82 KK, Keluarga Sejahtera III: 77 KK, dan Keluarga Sejahtera III Plus: 5 KK. Mata pencarian penduduk umumnya petani/buruh tani. Selain itu juga terdapat peternak ayam dan bebek, dan nelayan. Jarak tempuh ke ibu kota kecamatan kurang lebih lima kilometer dengan lama tempuh kurang lebih satu jam menggunakan kendaraan bermotor, dan kurang lebih 0,5 jam menggunakan *Kelotok* (Perahu kayu kecil bermesin). Sedangkan jarak tempuh ke kabupaten/kota kurang lebih 50 kilometer dengan jarak tempuh dua jam menggunakan kendaraan bermotor (Monografi Desa Pemurus, 2017).

Untuk sampai ke Desa Pemurus, dari Kantor Kecamatan Aluh-Aluh, dapat dilalui melalui dua jalur: *Pertama*, melalui jalur darat (dalam kondisi jalan tidak baik, tanah berlubang) kurang lebih 1 – 1,5 jam perjalanan dari Kantor Kecamatan Aluh-Aluh. *Kedua*, melalui jalur air/sungai dengan naik *Kelotok* (kapal kecil terbuat dari kayu) menyusuri Sungai Aluh-Aluh

dan Sungai Simpang Kiapu kurang lebih 30-40 menit perjalanan. Ongkos sekali jalan melalui transportasi air tersebut, menurut warga setempat, berkisar antara Rp. 5.000,- sampai Rp. 10.000,-. Pengalaman penulis, untuk sampai ke Desa Pemurus tersebut, dengan *carter* (pergi-pulang), sebesar Rp. 250.000,- (Duaratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan data dan informasi tersebut, tergambar, betapa kemiskinan masih mewarnai kehidupan bagian besar warga Desa Pemurus, yang hanya 5 KK kategori Sejahtera III Plus dari 809 KK (Bag. Gambaran Umum). Kondisi kemiskinan warga Desa Pemurus tersebut juga diperkuat keterangan Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Banjar: “...Desa Pemurus merupakan salah satu desa termiskin di wilayah Kecamatan Aluh-Aluh, yang akses masyarakatnya dapat dikatakan masih sulit” (20 April 2018). Sungguhpun, data statistik Kabupaten Banjar menunjukkan, persentase penduduk miskin sebesar 2,96 persen, turun dibanding tahun 2016 sebesar 3,10 persen (Bappelitbang Banjar, 2017), jauh di bawah angka kemiskinan nasional per September 2018 9,66 persen (BPS, 2018), namun sejatinya kemiskinan masih membayangi kehidupan warganya, khususnya warga Desa Pemurus, yang tercermin dari belum tersedianya air bersih dan sanitasi yang layak.

## 2. Kebutuhan Dasar Keluarga Miskin

### a. Kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan, di Desa Pemurus, sudah tersedia Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Puskesmas Pembantu (Pustu) dari sisi sarana prasarana. Dengan demikian, akses masyarakat khususnya keluarga miskin terhadap ke dua layanan

dasar tersebut, relatif tidak ada masalah (mudah). Namun, yang bersifat lanjutan, untuk mengakses kedua layanan dasar tersebut, warga Desa Pemurus baru dapat memperolehnya keluar desa, setidaknya di lingkungan wilayah Kantor Kecamatan Aluh-Aluh.

Dalam pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan tersebut, wawancara dengan KPM, diperoleh informasi: “*Bantuan pemerintah yang saya terima, PKH, Beras, Kartu Sehat, dan Kartu Pintar*” (NHT, 18 April 2018). Sementara KPM lain menuturkan: “*saya terima PKH, Beras, dan Kartu Sehat*” (LTF, 18 April 2018). KPM lainnya lagi menuturkan: “*... saya dapat bantuan PKH, dan Beras. Tetapi Kartu Sehat dan, Kartu Pintar tidak dapat*” (STK, 87 April 2018).

Penuturan ketiga KPM yang tinggal di RT. 03 Desa Pemurus tersebut, dari hasil observasi kondisi rumah dan sanitasinya, anggota keluarga, dan pekerjaan pokok kepala keluarga, mereka menerima program bantuan sosial (PKH, Rastra, KIP, KIS). Ketiga KPM tersebut beragam sebagai penerima program bantuan sosial, ada yang menerima semua program, dan sebagian yang lain menerima sebagian program bantuan sosial saja. Akan tetapi, banyak juga ditemui, keluarga miskin (yang kondisinya sama tidak mampu bahkan lebih miskin lagi) dari penerima bantuan sosial tersebut, tetapi tidak menerima program bantuan sosial (PKH, Rastra, KIP, KIS). Hal itu terlihat dari penjelasan para pihak pemangku kepentingan penanggulangan kemiskinan daerah setempat, dari unsur Dinas Sosial melalui FGD diperoleh informasi: “*... masih banyak warga miskin di Kabupaten Banjar yang belum mendapatkan program bantuan dan tidak masuk BDT*” (20 April 2018).

Informasi tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Banjar, seperti daerah lain di

Indonesia, masih banyak terjadi *exclusion error* dan *inclusion error* dari sisi data. Terkait itu, dari peserta FGD diperoleh informasi:

*...kondisi seperti dikemukakan mitra kerja saya tadi berpangkal dari persoalan data. Problem di daerah, berdsarkan data PPLS 2011, dilakukan verifikasi dan validasi, kemudian dikirim ke pusat, namun hampir pada waktu bersamaan, terbit kebijakan KIP dan KIS dari pusat, dimana data yang digunakan adalah data lama. Yang terjadi, ya tadi, seperti di kemukakan bapak tadi... kacau (WSS, 20 April 2018).*

b. Kebutuhan dasar air bersih dan sanitasi

Air bersih, sebagai salah satu kebutuhan dasar sehari-hari warga masyarakat Desa Pemurus masih menjadi persoalan klasik. Wawancara dengan KPM, diperoleh informasi bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut, mereka memanfaatkan air sungai yang tersedia dekar rumahnya. Hal itu terlihat dari penuturan KPM berikut:

*...keperluan air bersih disini, terutama untuk kebutuhan air minum dan masak nasi, kami menggunakan air yang tersedia (air sungai), yang sebelumnya kami endapkan dulu. Jika musim hujan, ya air hujan kami gunakan khususnya untuk kebutuhan minum dan masak. Kalau untuk keperluan ke belakang (buang air besar), ya ke sungai..." (HTH 18 April 2018).*

Penuturan serupa disampaikan KPM lain, ibu NRH:

*...ya begitu, warga di sini, untuk keperluan sehari-hari, khususnya untuk minum dan masak nasi, menggunakan air sungai, yang diendapkan dulu dalam tempayan, dan air hujan jika musim hujan. Untuk urusan buang air besar, ya pergi ke sungai ..." (19 April 2018).*

Secara lebih komprehensif, kondisi kemiskinan warga Desa Pemurus sehingga urgen dilakukan sinergi program penanggulangan kemiskinan, dalam kerangka pemenuhan kebutuhan dasar mereka, khususnya air bersih, tercermin dari hasil wawancara dengan beberapa KPM, yang disarikan sebagai berikut:

1. NHT, seorang ibu rumah tangga berumur 40 tahun, dengan latar belakang pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar (SD), hanya sampai Kelas V. Ia bekerja sebagai buruh tani, demikian juga suaminya, bekerja sebagai buruh petani, dan bekerja apa saja yang dapat menghasilkan uang (*serabutan*).

Ibu NHT mempunyai dua orang anak, yang pertama ikut Paket C tingkat SD, dan yang kedua duduk di Kelas IV SD. Keluarga ini menempati sebuah rumah sederhana, kurang lebih berukuran 6 x 6 meter persegi, dengan konstruksi bangunan: dinding dari papan, atap dari anyaman ijuk (yang tersedia disekitar rumahnya), dan lantai dari papan. Rumah tersebut berdiri diatas topangan tiang-tiang kayu yang ditancapkan ke tanah (dengan ketinggian tertentu), karena letaknya di pinggir sungai yang terhubung dengan laut. Dalam waktu tertentu (air pasang), sangat memungkinkan air masuk rumah, jika tidak ditinggikan.

Kebutuhan dasar, yang menurutnya (masih) belum tersedia oleh keluarga Ibu NHT adalah air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih khususnya untuk kebutuhan air minum dan memasak nasi, memanfaatkan sumber air yang tersedia dilingkungannya, yaitu air sungai di dekat rumahnya, dengan cara sederhana yaitu mengendapkannya terlebih dulu dalam sebuah tempat. Program bantuan sosial, yang diterima keluarga Ibu NHT adalah PKH (tahun 2017 pengembangan), Rastra, KIS, dan KIP.

2. STK, ibu rumah tangga berumur 26

tahun, dengan latar belakang pendidikan *Madrasah Tsanawiyah* (setingkat SMP). Ia murni sebagai ibu rumah tangga. Suaminya, bekerja sebagai buruh *serabutan*.

Ibu STK mempunyai satu orang anak, yang baru duduk di Kelas I SD. Keluarga ini tinggal di sebuah rumah sederhana, kurang lebih berukuran 6 x 6 meter persegi. Seperti keluarga tidak mampu lainnya, konstruksi bangunan rumah: dinding dari papan, atap dari anyaman ijuk, dan lantai dari papan. Rumah tersebut juga berdiri di atas topangan tiang-tiang kayu yang ditancapkan ke tanah (dengan ketinggian tertentu), karena terletak di pinggir sungai yang terhubung dengan laut, jika tidak ditinggikan, sangat mungkin air masuk ke dalam rumah. Aset tanah berdirinya bangunan rumah yang ditempati Ibu STK, bukan miliknya sendiri, tetapi milik saudaranya.

Kebutuhan dasar yang menurutnya tidak tersedia adalah air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan dasar ini sebagai keperluan sehari-hari terutama untuk kebutuhan air minum dan memasak nasi, ia memanfaatkan air sungai, yang dekat rumahnya, dengan cara sederhana, yaitu mengendapkan terlebih dulu dalam sebuah tempat. Sementara untuk keperluan buang air besar, keluarga ini, seperti keluarga lainnya, memanfaatkan sungai dekat rumahnya. Program bantuan sosial, yang diterima keluarga Ibu STK saat ini adalah PKH (tahun 2017 –pengembangan), Rastra, dan KIS. KIP belum/tidak ia dapat.

3. LTF, seorang ibu berumur 60 tahun, dengan latar belakang pendidikan SD juga tidak tamat SD (Kelas IV). Ibu LTF mempunyai ketrampilan membuat kue, sehingga tiap hari ia membuatnya. Penjualannya, ia menitipkan di warung-warung disekitarnya dan di kantin sekolah (SD). Suaminya, bekerja sebagai petani.

Ibu LTF mempunyai beberapa orang

anak yang sudah berkeluarga, yang paling kecil duduk di Kelas IV SD. Keluarga ini menempati sebuah rumah, kurang lebih berukuran 10 x 12 meter persegi (relatif besar). Seperti bangunan rumah warga lainnya di Desa Pemurus, konstruksi bangunannya: dinding berasal dari papan, atap dari anyaman ijuk (yang ada disekitar rumah mereka), dan lantai dari papan. Rumah tersebut berdiri di atas topangan tiang-tiang kayu yang ditancapkan ke tanah, dengan ketinggian tertentu, seperti waga desa lainnya, karena letak rumahnya di pinggir sungai yang terhubung dengan Laut Jawa sehingga dalam kondisi air pasang, sangat mungkin masuk rumah jika tidak ditinggikan.

Kebutuhan layanan dasar yang menurutnya belum tersedia adalah air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan dasar ini, seperti keluarga lainnya dilingkungkannya, memanfaatkan air sungai di dekat rumahnya. Sementara, untuk keperluan buang air besar, keluarga ini, seperti keluarga lainnya memanfaatkan air sungai. Program bantuan sosial, yang diterima keluarga Ibu LTF saat ini adalah PKH (tahun 2017 –pengembangan), Rastra, dan KIS.

4. HTH, seorang ibu, berumur 40 tahun, janda (ditinggal mati), dengan latar belakang pendidikan tidak tamat SD (Kelas I). Untuk menghidupi keluarganya, ia berjualan kue (mengambil dari tetangganya dan menjualnya keliling kampung). Disamping itu ia juga buruh tani, dan bekerja *serabutan*.

Ibu HTH mempunyai dua orang anak yang masih duduk di SD, Kelas VI dan IV. Keluarga ini menempati rumah sederhana, berukuran kurang lebih 6 x 6 meter persegi. Seperti bangunan rumah warga lainnya, konstruksi bangunannya: dinding berasal dari papan, atap dari anyaman ijuk (yang ada disekitar rumah mereka), dan lantai

dari papan. Sama dengan rumah warga sekitarnya, rumah tersebut berdiri diatas topangan tiang-tiang kayu (dalam ketinggian tertentu), sehingga tidak memungkinkan air masuk rumah. Rumah Ibu HTH terdiri dari dua bagian, yaitu bagian dapur dan bagian/ ruang keluarga/tamu saja, tanpa kamar tidur.

Air bersih dan sanitasi seperti keluarga kurang mampu yang lain di desanya, masih menjadi permasalahan. Untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut, ia memanfaatkan air sungai dekat rumahnya, demikian halnya untuk keperluan buang air besar keluarga ini memanfaatkan sungai. Program bantuan sosial, yang diterima keluarga Ibu HTH saat ini adalah PKH (tahun 2017 pengembangan), Rastra, KIS, dan KIP.

5. NRH, seorang ibu rumah tangga berumur 45 tahun, dengan latar belakang pendidikan *Madrasah Tsanawiyah* (setingkat SMP). NRH murni sebagai ibu rumah tangga. Suaminya sebagai petani.

Ibu NRH mempunyai dua orang anak, yang pertama sudah berkeluarga, dan yang kedua masih duduk di Kelas III SD. Keluarga ini menempati rumah, yang berukuran kurang lebih 10 x 12 meter persegi (relatif besar). Sebagaimana bangunan rumah warga lainnya, konstruksi bangunannya: dinding berasal dari papan, atap dari anyaman ijuk (yang ada disekitar rumah mereka), dan lantai dari papan. Sebagaimana rumah warga di sekitarnya, rumah tersebut berdiri diatas topangan tiang-tiang kayu (dalam ketinggian tertentu), karena letaknya di pinggir sungai yang terhubung dengan laut, sehingga dalam kondisi air pasang, sangat mungkin masuk rumah jika tidak ditinggikan.

Untuk memenuhi kebutuhan dasar air bersih khususnya untuk kebutuhan air minum dan memasak nasi, keluarga ini memanfaatkan air sungai yang dekat rumahnya, dengan cara mengendapkan

dulu dalam sebuah *wadah*. Seperti warga lainnya, untuk buang air besar, keluarga ini memanfaatkan sungai. Program bantuan sosial, yang telah diterima keluarga Ibu NRH adalah PKH (tahun 2017 –pengembangan), Rastra, KIS, dan KIP.

Data kualitatif tersebut menunjukkan bahwa air bersih dan sanitasi yang layak sebagai kebutuhan dasar, belum dapat diakses dan dinikmati warga Desa Pemurus, sebagai akibat belum terjadinya sinergi antar para pihak terkait di pelbagai tingkatan. Hasil penelitian Sahar dan Salomo (2018) menemukan bahwa tidak optimalnya pembangunan dimensi *trust* dan *mutual understanding* sebagai salah satu komponen esensial, juga, kapasitas pemimpin, kolaborasi menjadi variabel penentu menghambat proses kolaborasi ke tingkat yang lebih iteratif dan dinamis (*collaborative dynamics*).

Dari sisi regulasi, sesungguhnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 83 (1), telah dikemukakan dengan jelas, pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam satu kabupaten/kota. Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Keterlibatan pelbagai pihak dalam pembangunan kawasan perdesaan memiliki potensi memajukan desa dengan mengkolaborasikan sumber daya yang ada. Kolaborasi dimulai dari rencana pembangunan yang dibahas oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa bahkan sebaliknya dari desa sampai tingkat pusat melalui sebuah konsesus. Permasalahannya, dari sisi konsep *Collaborative Governance*,



kurang berjalannya *sistem konteks* yang dilihat dari kondisi perubahan peraturan perundang-undangan, *drivers* yang dilihat dari elemen *leadership* sangat memengaruhi perencanaan pembangunan di desa, dan dinamika kolaborasi yang terjadi yaitu kondisi yang tidak menguntungkan semua pihak sehingga masih terjadi ego sektoral (Febrian, 2016).

Pemerintah Kabupaten Banjar telah berupaya melakukan sinergi program, baik yang sumber pendanaannya dari APBN, APBD Provinsi Kalimantan Selatan, dan APBD Kabupaten Banjar sendiri. Meskipun demikian kontribusi daerah melalui APBD masih relatif terbatas, seperti terlihat pada tabel (Penerima Bansos Kab. Banjar 2017).

Data tersebut memperlihatkan bahwa bantuan sosial bagi keluarga kurang mampu menjadi salah satu agenda utama Pemerintah Kabupaten Banjar dalam kerangka penang-

gulangan kemiskinan. Hal itu terlihat dari kebijakan pemerintah daerah setempat, bahkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang menganggarkan khususnya bidang kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar bagi keluarga miskin. Seperti terlihat pada data, bantuan sosial di wilayah Kabupaten Banjar meliputi jaminan kesehatan yang pembiayaannya bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kabupaten Banjar sendiri. Kemudian, bantuan pangan berupa Raskin/Rastra/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan PKH yang sumber pendanaannya murni dari APBN.

Data tersebut juga memperlihatkan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Banjar. Dengan bersinergi, akan diperoleh manfaat yang lebih besar. Dalam kaitan itu, pengalaman Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT KAN) di Kota Payakumbuh menunjukkan, dalam rentang

Rekapitulasi Penerima Bantuan Sosial di Kabupaten Banjar (2017)

NO	KECAMATAN	PBI-JKN APBN	PBI-JK PROV	PBI-JK DAERAH	KKS/ RASTRA/ BPNT	KKS + PKH	KKS NON PKH	BDT 2015-2016
1	Aluh-aluh	14,967	95	93	2,678	1,618	1,060	14442
2	Aranto	2,524	188	36	424	233	191	2359
3	Astambul	8,072	187	132	1,305	810	495	7791
4	Beruntung Baru	6,039	498	21	1,016	601	415	4812
5	Cntapuri Darussalam	1,675	5	10	205	75	103	1071
6	Gambut	5,003	31	45	639	206	433	4479
7	Karang Intan	3,797	182	86	499	208	291	4742
8	Kertak Hanbyar	5,806	1	60	795	561	234	3341
9	Martapura	11,485	278	149	1,390	744	646	8217
10	Martapura Barat	7,037	77	113	978	367	611	5337
11	Martapura Timur	4,391	460	87	808	397	411	5519
12	Mataraman	2,188	41	49	333	167	166	2783
13	Paramasan	1,821	2	0	284	176	108	1324
14	Pengaron	2,832	26	10	380	197	183	2518
15	Sambung Makmur	2,208	12	3	416	308	108	2707
16	Simpang Empat	2,766	75	31	334	140	221	3338
17	Sungai Pinang	2,722	36	13	495	376	119	2312
18	Sungai Tabuk	11,246	56	165	1,695	604	1,091	9258
19	Tatah Makmur	3,017	9	9	608	411	197	3905
20	Telaga Bauntung	496	8	0	104	82	22	415
<b>JUMLAH</b>		<b>100,092</b>	<b>2267</b>	<b>1112</b>	<b>15,386</b>	<b>8,281</b>	<b>7,105</b>	<b>90,670</b>

waktu Mei-November 2015, dalam bidang pendidikan dan kesehatan, telah dilakukan layanan terhadap 438 keluarga miskin dan rentan, dengan bermitra dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Mitra Kenanga. Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dan santunan bagi lanjut usia terlantar juga dapat dilakukan dengan bermitra dengan BRI, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan Lembaga Infaq Sadaqah Muhammadiyah (Lazismu) (Muhtar dan Agus, 2016).

Kebijakan tersebut merupakan respon positif dan wujud tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan pihak lainnya dalam perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Namun, sesungguhnya kondisi tersebut lebih disebabkan karena BDT (2015) sebagai perbaikan data PPLS (2011) masih menyisakan permasalahan. Pendek kata, kenyataan di lapangan menunjukkan, masih banyak terjadi *exclusion error* keluarga miskin yang sesungguhnya berhak menerima bantuan sosial, karena tidak masuk BDT, maka tidak mendapat bantuan sosial. Demikian sebaliknya, masih terjadi *inclusion error* dimana keluarga yang sebenarnya tidak berhak menerima bantuan sosial, justru menerimanya (Periksa Bag. Hasil Penelitian, Pernyataan Peserta FGD, 2018).

Data keluarga miskin yang tidak valid menyebabkan ketidaktepatan sasaran. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen misalnya, pemerintah daerah setempat membentuk Unit Penanggulangan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK), yang bertujuan mengintegrasikan data warga miskin dan memberikan pelayanan terpadu terkait kebutuhan dan keluhan masyarakat sehingga tidak ada lagi warga miskin yang mengalami kesulitan mendapatkan pelayanan sosial dasar, seperti kesehatan, pendidikan, pangan, dan papan.

Sistem integrasi data menjadi kunci dalam meningkatkan pelayanan untuk menanggulangi kemiskinan. Dengan demikian, tidak ada lagi kejadian warga miskin "*dipingpong*" oleh prosedur birokrasi dan mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan. Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen menilai, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) tidak fokus dan tidak terintegrasi satu sama lain, karena ego sektoral, diskoordinasi, dan kerancuan data dalam mengkategorikan warga miskin (Muhtar dan Indah, 2015).

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan bahwa meskipun berdasarkan data statistik jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjar relatif rendah, termasuk didalamnya warga Desa Pemurus Kecamatan Aluh-Aluh dibanding-kan daerah lain di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, bahkan jauh lebih rendah lagi jika dipersandingkan dengan data statistik penduduk miskin secara nasional, realitasnya menunjukkan bahwa warga perdesaan, dalam kasus ini warga Desa Pemurus Kecamatan Aluh-Aluh belum dapat mengakses kebutuhan dasar air bersih.

Untuk memenuhi kebutuhan air minum dan memasak nasi khususnya, warga Desa Pemurus, dengan cara sederhana mengendapkan terlebih dulu dalam sebuah wadah (tempayan). Beberapa saat kemudian, jika air sudah terlihat jernih, mereka baru memanfaatkannya sebagai sumber air minum dan untuk memasak nasi. Dan ketika musim hujan, mereka memanfaatkan air hujan sebagai sumber air bersih alternatif. Sementara, untuk kebutuhan dasar lainnya, yaitu kebutuhan dasar pendidikan, kebutuhan dasar kesehatan, dan kebutuhan dasar pangan, melalui APBN dan APBD, warga desa tersebut telah dapat mengakses bantuan sosial pemerintah melalui PKH dan Rastra, meskipun masih dijumpai *exclusion* dan *inclusion error*.

## SARAN

Bertolak dari simpulan seperti dikemukakan, disarankan, sinergi program penanggulangan kemiskinan yang *pro grassroot* tersebut, yakni kebutuhan dasar air bersih dan sanitasi yang layak bagi keluarga miskin, mendesak dilakukan. Dengan terlebih dulu dilakukan koordinasi ditingkat pusat, sekurangnya antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan kemudian diikuti di tingkat daerah.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan dimuatnya naskah tulisan ini di Jurnal Sosiokonsepia, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada mas Agus, sesama anggota Tim Kajian di Kabupaten Banjar, yang dengan ijinnya, penulis menyusun dalam Jurnal ini. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Banjar dan segenap jajarannya, yang memfasilitasi dan terselenggaranya FGD dengan pemangku kepentingan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjar. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada ketua tim kajian cepat dan Kepala Puslitbangkesos sebagai penanggung jawab kegiatan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.R. Sahar & R.V. Solomo. (2018). *Tata Kelola Kolaboratif Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pinrang. The Indonesian Journal of Public Administration*. Vol. IV. No. 2 Desb. 2018.
- Angka Kemiskinan Di Kabupaten Banjar Mengalami Penurunan. <http://bappelitbang.banjarkab.go.id/index.php/profil-daerah-2/> (Diakses 15 Mei 2018).
- Bogdan & Taylor. (1975). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Bank Dunia. (2007). *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: PT. Grha Info Kreasi.
- *Tingkat Kemiskinan Global Turun*. <https://republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis-global/18/09/20/pfc1t1383-bank-dunia-tingkat-kemiskinan-global-turun> (Diakses 16 Mei 2018).
- Covey, S. (2004). *The 7 Habits of Highly Effective People* (Cetakan Ke-15). Jakarta: Binarupa Aksara.
- Dinas Sosial Kabupaten Banjar. (2017). *Rekapitulasi Penerima Bantuan Sosial di Kabupaten Banjar*.
- Febrian, R.A. (2016). *Colaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan, Tinjauan Konsep dan Regulasi*. Wedana, Jurnal Pemerintahan, Politik, dan Birokrasi. Vol. II No.1 Okt. 2016.
- Komitmen terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. <http://presidenri.go.id/pengentasan-kemiskinan/komitmenterdap-tujuan-pembangunan-berkelanjutan.html> (Diakses 11 Januari 2019).
- Lewis, D. (2000). "Building 'Active' Partnership in Aid-Recipient Countries: Lessons from a Rural Development Project in Bangladesh". In: Osborne, S. P. (org.). *Public-Private Partnerships: Theory and Practice in International Perspective*. London: Routledge.
- McQuaid, R.W. (2000). *The Theory of Partnership: Why Have Partnerships?* In: Osborne, S. P. (ed.) *Public-Private*

- Partnerships: Theory and Practice in International Perspective*. London: Routledge.
- Moekijat (2002). *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Muhtar & Huruswati, I. (2015). *Pelayanan Satu Pintu Penanggulangan Kemiskinan di Sragen*. Sosiokonsepia Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 5 No. 1 Sept – Desember 2015.
- Muhtar & Purwanto, A.B. (2016). Peran Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Payakumbuh. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Sosiokonsepia*. Vol. 5 No. 03 Mei – Agustus 2016.
- Monografi Desa Pemurus. (2017).
- Penrose, A. (2000). *Partnership*. In: Robinson, D.; Hewitt, T. And Harriss, J. (orgs.). *Managing Development: Understanding inter-organizational relationships*. London: Sage and The Open University.
- Persentase penduduk miskin Maret 2018 turun menjadi 9,82 persen. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html> (Diakses 17 Januari 2019).
- Rahmawati, T., et al. (2014). *Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah*. Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 2, No. 4, Hal. 641-647.
- Sudarwan, D. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sejak Kemerdekaan belum menikmati layanan air bersih*. <http://keslingkawasanpantai-pesisir.blogspot.com/2009/11/sistem-penyediaan-air-bersih-di-kawasan.html> (Diakses 12 April 2018).
- Vasconcellos, M. & Vasconcellos A. M. (2009). *Partnership, empowerment and local development*. *Interações, Campo Grande*. Vol. 10, no. 2, 133-148.